

Analisis Standar Biaya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)¹

Oleh

Dr. Akhmad Makhfatih, MA (Universitas Gajah Mada)
Prof.Dr. Abdul Halim, Ak., MBA (Universitas Gajah Mada)
Prof.Dr. Bernadette Robiani, MSc. (Universitas Sriwijaya)
Dr. Suahazil Nazara (Universitas Indonesia)
Drs. Syarifuddin, M.Soc.Sc. (Universitas Hasanuddin)
Drs. Masrisal, M.Soc.Sc. (Universitas Andalas)
Dr. Spener Rumbewas (Universitas Cendrawasih)

Abstrak

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan di Indonesia telah diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Hasil pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini dapat dilihat dari adanya kemajuan pada beberapa indikator kesehatan di Indonesia, seperti angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator kesehatan di Indonesia yang belum membaik, seperti tingkat kematian ibu hamil yang tertinggi di Asia Timur, adanya kenaikan tingkat gizi buruk di beberapa provinsi, dan rendahnya akses air bersih dan sanitasi pada masyarakat miskin. Lebih lanjut, di Indonesia juga terjadi ketidakmerataan kinerja kesehatan antar daerah. Indikator kesehatan di berbagai daerah Jawa dan Bali secara umum lebih baik daripada daerah lainnya, terlebih bila dibandingkan dengan daerah di bagian timur Indonesia.

Berdasarkan kondisi yang ada, pemerintah berencana untuk meningkatkan kinerja kesehatan di Indonesia pada tahun 2009. Hal tersebut dilakukan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,96 triliun pada APBN tahun 2009 untuk penekanan prioritas pembangunan kesehatan dan keluarga berencana. Akan tetapi, di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia tahun 2009 dimungkinkan tidak akan sebaik kondisi pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang mencapai 6,8 persen. Kondisi perekonomian tahun 2009 semakin diperparah dengan adanya dampak krisis keuangan global di Indonesia. Pada tahun 2009 diperkirakan akan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja dan kelesuan ekonomi, yang selanjutnya akan berdampak pada penerimaan pemerintah dan pemerintah daerah.

¹ Procceding Diseminasi I Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, 2009.